



TAHUN 2025

KECAMATAN ANGKONA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Angkona dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar/acuan Pemerintah Kecamatan Angkona dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai indikator terhadap capaian keberhasilan yang telah ditargetkan pada Renstra kurun waktu Lima Tahun (2021-2026).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Angkona yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Renja Tahun 2025 ini representif dan lebih baik.

Angkona, 19 Juli 2024

Kamat Angkona,



PUTU GEDE SUDARSANA,SKM.,M.Kes

Pangkat : Pembina

NIP. : 19820205 200604 1 011

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Angkona	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angkona	31
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ANGKONA	37
BAB V PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang lebih baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun).

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) bahwa :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Seorang Camat disamping melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleknya tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka telah disusun suatu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Angkona Tahun 2021 – 2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya di Kecamatan Angkona.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Angkona untuk rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sbb :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahsebagaimana telah di ubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Angkona tahun 2025 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada periode tahunan dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Angkona guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Angkona tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Sebagai suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur khususnya Kecamatan Angkona;
4. Merupakan landasan kebijakan dari program strategi serta menjadi skala prioritas pembangunan Kecamatan yang akan dikategorikan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Angkona T.A 2025;
5. Sebagai landasan bagi Camat dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan serta pelaksanaan program kerja Camat ;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Angkona dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkona Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Angkona

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angkona tahun 2023 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Realisasi Kinerja : Target 100% Realisasi : 97,76 %
- b. Realisasi Anggaran : Target 100% Realisasi : 97,26 %

Lebih detail dari hasil pelaksanaan dari Renja Kecamatan Angkona tahun 2023 sebagaimana tertera pada **Tabel. 01** di bawah ini :

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023																	
Kecamatan Angkona																	
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	2.621.941.995	319.577.209	865.325.817	568.266.496	794.605.412	72	2.547.774.934	97,74%	97,17%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	32.881.175	24 1.941.000	24 4.920.000	- 7.570.000	- 10.810.500	48	25.241.500	100,00%	76,77%				

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	2	16.213.980	-	767.000	1	4.420.000	1	6.582.500	-	3.238.000	2	15.007.500	100,00%	92,56%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	2	6.313.760	-	-	-	-	1	360.000	1	4.727.000	2	5.087.000	100,00%	80,57%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kali)	2	2.331.230	-	395.000	-	170.000	1	-	1	1.403.500	2	1.968.500	100,00%	84,44%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun (Dokumen)	7	8.022.205	4	779.000	1	330.000	1	627.500	1	1.442.000	7	3.178.500	100,00%	39,62%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	1.945.621.555	25	249.800.959	24	776.797.013	-	410.662.580	-	470.803.203	49	1.908.063.755	97,54%	98,07%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	20	1.910.619.865	20	247.800.959	20	764.778.513	19	401.147.580	19	459.361.703	20	1.873.088.755	97,50%	98,04%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan persemester (Laporan)	19	35.001.690	6	2.000.000	4	12.018.500	5	9.515.000	4	11.441.500	19	34.975.000	100,00%	99,92%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu (%)	100	13.074.230	25	-	25	5.304.500	-	2.962.500	-	4.781.400	50	13.048.400	100,00%	99,80%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	13.074.230	3	-	3	5.304.500	3	2.962.500	3	4.781.400	12	13.048.400	100,00%	99,80%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	49.049.005	6	492.000	6	1.000.000	-	22.652.000	-	14.565.000	11	38.709.000	95,52%	78,92%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	8.787.005	1	492.000	1	1.000.000	1	3.287.000	-	3.905.000	3	8.684.000	75,00%	98,83%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (Orang)	6	40.262.000	-	-	-	-	3	19.365.000	3	10.660.000	6	30.025.000	100,00%	74,57%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD (%)	100	340.200.975	19	48.665.500	29	56.050.000	-	82.293.500	-	153.126.740	48	340.135.740	98,30%	99,98%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	9	5.820.900	3	1.455.000	1	-	3	2.910.000	2	1.454.000	9	5.819.000	100,00%	99,97%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	27	10.480.075	7	1.666.000	6	-	7	6.188.500	6	2.619.500	26	10.474.000	96,30%	99,94%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	4	13.720.000	4	1.890.000	4	-	4	7.780.000	4	4.049.800	4	13.719.800	100,00%	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	8.640.000	9	1.080.000	14	1.625.000	19	2.285.000	18	3.650.000	60	8.640.000	100,00%	100,00%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu (Kali)	2670	120.150.000	338	11.845.000	640	22.500.000	675	30.375.000	897	55.410.000	2.550	120.130.000	95,51%	99,98%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan (kali)	540	181.390.000	97	30.729.500	156	31.925.000	141	32.755.000	146	85.943.440	540	181.352.940	100,00%	99,98%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	79.623.300	-	-	-	-	-	9.950.000	-	62.181.550	-	72.131.550	100,00%	90,59%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	24.673.300	-	-	-	-	-	-	1	21.590.000	1	21.590.000	100,00%	87,50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	14	54.950.000	-	-	-	-	1	9.950.000	13	40.591.550	14	50.541.550	100,00%	91,98%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	112.651.755	21	15.897.750	25	18.378.804	-	29.175.916	-	38.237.172	46	101.689.642	97,88%	90,27%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	1000	14.914.555	205	957.000	233	-	296	7.136.000	252	6.818.500	986	14.911.500	98,60%	99,98%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84	36.703.200	14	5.940.750	28	4.878.804	21	4.689.916	16	10.234.672	79	25.744.142	94,05%	70,14%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	2	3.850.000	-	-	-	-	2	3.850.000	-	-	2	3.850.000	100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	4	57.184.000	4	9.000.000	4	13.500.000	4	13.500.000	4	21.184.000	4	57.184.000	100,00%	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (%)	100	48.840.000	4	2.780.000	15	2.875.500	-	3.000.000	-	40.099.847	20	48.755.347	97,58%	99,83%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	26.000.000	2	-	2	1.825.500	2	3.000.000	2	21.099.847	2	25.925.347	100,00%	99,71%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	12.390.000	3	2.780.000	3	1.050.000	1	-	12	8.550.000	19	12.380.000	90,48%	99,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.450.000	-	-	-	-	-	-	1	10.450.000	1	10.450.000	100,00%	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															97,74%	97,17%
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
KECAMATAN																
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	32.792.005		5.436.000		7.130.000		6.935.000		13.207.500	92	32.708.500	96,23%	99,75%

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100	32.792.005	31	5.436.000	37	7.130.000	-	6.935.000	-	13.207.500	68	32.708.500	96,23%	99,75%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1300	32.792.005	365	5.436.000	388	7.130.000	285	6.935.000	213	13.207.500	1.251	32.708.500	96,23%	99,75%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	96,23%	99,75%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	83.753.885		14.500.000		13.715.000		20.313.500		33.145.500	78	81.674.000	99,50%	97,52%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	83.753.885	36	14.500.000	21	13.715.000	-	20.313.500	-	33.145.500	57	81.674.000	99,50%	97,52%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	33	11.288.340	32	10.427.500	-	830.000	-	-	-	-	32	11.257.500	96,30%	99,73%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	70	72.465.545	70	4.072.500	70	12.885.000	70	20.313.500	70	33.145.500	70	70.416.500	100,00%	97,17%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,50%	97,52%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	13.712.860		870.000		870.000		1.665.000		10.269.000	60	13.674.000	94,20%	99,72%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100	9.268.385	16	535.000	16	535.000	-	1.335.000	-	6.846.000	33	9.251.000	91,42%	99,81%	

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	100	6.086.685	100	535.000	100	535.000	100	1.335.000	100	3.670.000	100	6.075.000	100,00%	99,81%
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	4	3.181.700	-	-	-	-	-	-	3	3.176.000	3	3.176.000	75,00%	99,82%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%) (Persen)	100	4.444.475	25	335.000	50	335.000	-	330.000	-	3.423.000	75	4.423.000	100,00%	99,52%
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas yang dilaksanakan (Kali)	6	4.444.475	1	335.000	2	335.000	2	330.000	1	3.423.000	6	4.423.000	100,00%	99,52%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																94,20%	99,72%
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	21.722.810		3.646.000		2.800.000		4.590.000		10.683.000	71	21.719.000	97,08%	99,98%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (Persen)	100	21.722.810	21	3.646.000	25	2.800.000	-	4.590.000	-	10.683.000	46	21.719.000	97,08%	99,98%
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (Kali)	100	21.722.810	88	3.646.000	100	2.800.000	100	4.590.000	100	10.683.000	97	21.719.000	97,08%	99,98%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																97,08%	99,98%
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	18.260.345		2.747.000		425.000		2.660.000		12.287.500	58	18.119.500	100,00%	99,23%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)	100	18.260.345	42	2.747.000	8	425.000	-	2.660.000	-	12.287.500	50	18.119.500	100,00%	99,23%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	20	12.261.105	10	2.747.000	-	425.000	-	1.520.000	10	7.498.500	20	12.190.500	100,00%	99,42%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	5.999.240	10	-	10	-	10	1.140.000	10	4.789.000	10	5.929.000	100,00%	98,83%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	99,23%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				2.792.183.900		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								97,76%	97,26%	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona

Kantor Camat Angkona yang dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sangat diharapkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama kondisi masyarakat dewasa ini yang cukup kritis dan menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.

Akan tetapi daya dukung berupa sumber daya manusia secara kualitas masih belum memadai sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal kurang terakomodasi dengan baik. Namun dengan keterbatasan yang ada, Camat Angkona beserta stafnya sebagai bagian dari aparat pemerintah Kabupaten Luwu Timur berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam pelaksanaan tugasnya di masyarakat.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Angkona meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi dan pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angkona dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026, Adapun capaian kinerja program kecamatan Angkona Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Untuk mencapai kinerja pelayanan publik yang maksimal perlu didukung oleh satu program penunjang yang berisi beberapa kegiatan terkait kesekretariatan berupa penyiapan dokumen pendukung dasar kegiatan, penyediaan gaji pegawai dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dari target kinerja program 100%, terealisasi sebesar 97,74 %.

b. Persentase Capaian Kinerja peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

Untuk mencapai kinerja pelayanan Kecamatan mendukung Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Dari kegiatan tersebut rata-rata pencapaian kerjanya sebesar 96,23% dari target 100%. Rendahnya capaian kegiatan ini disebabkan karena indikator kinerja kegiatan berupa pengurusan penerbitan IMB rumah tinggal permanen yang awalnya menjadi kewenangan kecamatan dialihkan menjadi kewenangan kabupaten dalam hal ini Dinas PTSP.

c. Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Untuk mencapai kinerja pelayanan kecamatan mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa. Dari program tersebut pencapaian kerjanya sebesar 99,50% dari target 100%.

d. Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai kinerja pelayanan kecamatan mendukung Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 (dua) kegiatan yang mendukung yaitu Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Capaian kerjanya program ini sebesar 94,20% dari target 100%. Rendahnya capaian kinerja program ini disebabkan oleh karena ada satu sub kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pertimbangannya adalah efisiensi anggaran karena substansi sasaran dari sub kegiatan ini dapat dicapai pula melalui sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

e. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Untuk mencapai kinerja pelayanan kecamatan Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dari program tersebut pencapaian kerjanya sebesar 97,08% dari target 100%.

f. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berjalan Sesuai Standar Dan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku.

Untuk mencapai kinerja Pelayanan kecamatan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berjalan Sesuai Standar Dan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa. Dari program ini pencapaian kerjanya sebesar 100% dari target 100%.

Untuk lebih jelasnya terkait persentase pencapaian kinerja pelayanan publik Kecamatan Angkona lihat **Tabel.02** pada lampiran berikut ini :

Tabel 02
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KECAMATAN ANGKONA

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Kinerja				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	99,63 %	97,74 %				
2	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	33,33 %	96,23 %				
3	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	99,75 %	99,50 %				
4	Persentase Capaian pelayanan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	73,18 %	94,20 %				
5	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 %	97,08 %				

6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berjalan Sesuai Standar Dan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	97,60 %	100%				
---	--	------	------	------	------	------	---------	------	--	--	--	--

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Luwu Timur kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Luwu Timur;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya program-program pemerintah yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan kualitas dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus

mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 5) Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kecamatan Angkona tentang pengembangan wilayah bersama sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi pertanian dan perikanan yang layak untuk terus dikembangkan, maka Kecamatan Angkona harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Renja dengan kebutuhan tahun 2025. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Kantor Camat Angkona Tahun 2025 disajikan dalam **Tabel.03** pada lampiran.

Tabel 03
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	RANCANGAN AWAL				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI KECAMATAN (%)	100	3.641.093.795	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI KECAMATAN (%)	100	2.652.001.025	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan	100	32.400.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan	100	43.134.900	

		evaluasi kinerja (%)				evaluasi kinerja (%)			
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	16.337.650	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	7.709.200	
03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2.311.300	
04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	7	18.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	7	16.776.750	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	2.715.329.847	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	2.046.229.475	
05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	22	2.671.061.022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	19	2.011.273.575	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	44.268.825	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	19	34.955.900	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan	100	15.292.940	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan	100	13.907.650	

		termanfaatkan (%)				termanfaatkan (%)			
07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	15.292.940	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	13.907.650	
IV	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	100	50.192.940	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)	0	-	
08	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	50.192.940	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	0	-	
V	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	59.700.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	44.784.300	
09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	32	19.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	30	-	
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	4	3.700.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	4	13.725.300	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	6	37.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	3	31.059.000	

VI	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	402.672.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	264.775.400
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9	8.761.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	4	5.891.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	28	15.487.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	4	11.375.400
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	16.860.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	12	12.595.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	60	8.349.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	27	9.900.000
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	2000	112.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	6	88.000.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kali)	600	240.465.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kali)	600	137.014.000
VII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100	101.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100	79.112.800
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	2	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1	25.000.000
19	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	3	11.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	2	8.532.800

20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	25.380.000	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	0	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	3	20.200.000	
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi (%)	100	169.145.168	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi (%)	100	115.616.500	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan (surat)	1200	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan (surat)	4	14.904.800	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan internet, air dan listrik yang terbayarkan (rekening)	96	56.895.168	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening layanan internet, air dan listrik yang terbayarkan (rekening)	12	36.703.200	
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (jenis)	2	5.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (jenis)	3	6.825.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	6	81.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	12	57.183.500	
IX	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	95.360.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	44.440.000	

26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	7	29.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	3	19.000.000	
27	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	8	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	0	-	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	30	26.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	21	12.140.000	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	13.300.000	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	0	-	
B	PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN (%)	100	59.700.000	PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN (%)	100	30.273.100	
X	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan (%)	100	59.700.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan (%)	100	30.273.100	

31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah volume sampah yang terangkut (Laporan)	2200	45.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	12	-	
32	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	60	14.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	1200	30.273.100	
C	PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DILAKSANAKAN	100	81.444.563	PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DILAKSANAKAN	100	78.137.775	
XI	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	81.444.563	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	78.137.775	
33	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	32	12.457.835	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	6	13.021.500	
34	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (orang)	70	68.986.728	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (orang)	4	65.116.275	
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	40.864.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	13.704.800	

XII	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan	100	24.640.500	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan	100	9.283.400	
35	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	100	12.640.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	4	6.085.900	
36	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	4	12.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	4	3.197.500	
XIII	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100	16.224.000	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100	4.421.400	
37	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan (kali)	4	16.224.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan (kali)	4	4.421.400	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	100	36.925.525	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	100	19.811.600	

XIV	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100	36.925.525	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100	19.811.600	
38	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	36.925.525	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	12	19.811.600	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (%)	100	50.124.846	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (%)	100	18.255.600	
XV	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (%)	100	50.124.846	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (%)	100	18.255.600	
39	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Difasilitasi Penyusunannya (dokumen)	20	20.052.477	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Difasilitasi Penyusunannya (dokumen)	12	12.260.400	
40	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	21.253.219	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	0	-	

41	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (desa)	10	8.819.150	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (desa)	1	5.995.200	
TOTAL				3.910.153.229	2.812.183.900				

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Angkona pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan;
3. Pemberian fasilitasi dan pendampingan terhadap aparat desa dalam menyusun anggaran desa;
4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
5. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
7. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
8. Mendorong kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Sinkronisasi program prioritas Kecamatan Angkona yang telah ditetapkan dan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh Tim Perencanaan Daerah (Bapelitbangda) yang kemudian oleh Kecamatan Angkona dan diperjelas dalam bentuk program prioritas dengan indikator keluaran / sasaran yang jelas.
- Penyusunan rumusan program dan kegiatan Program prioritas pada Kecamatan Angkona di asistensi oleh tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari Bapelitbangda dan BPKD, untuk selanjutnya didiskusikan apakah kegiatan yang diusulkan itu relevan dengan keadaan sekarang/satu tahun kedepannya.
- Hasil dari rumusan tim TAPD ini selanjutnya di bahas di DPRD dengan agenda pembahasan anggaran kecamatan untuk selanjutnya disahkan untuk menjadi bahan dalam menyusun RKPD Tahun berikutnya.

Kecamatan Angkona

- Program prioritas dan pagu indikatif hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan kemudian akan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.
- Hasil Musrenbang kecamatan dan Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Kendala yang sering ditemui pada Musrenbang tingkat Kecamatan yaitu usulan-usulan yang diajukan terlalu mikro dan lebih dominan pada pembangunan fisik. Disamping itu sering ditemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang mengutarakan pendapat hanya segelintir orang.

BAB III

TUJUAN,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Pelayanan Kantor Camat Angkona secara teknis mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada :

- a. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional butir ke 7 yaitu : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan program prioritas adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
- b. Prioritas RKP Provinsi yaitu Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Angkona

Penetapan tujuan dan sasaran SKPD pada umumnya didasari oleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar SKPD yang bersangkutan mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktifitas yang tidak tercapai, karena dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan berarti SKPD tersebut mengetahui kelebihan atau kekuatannya untuk melaksanakan suatu sasaran dan aktifitasnya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu SKPD atau instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Adapun tujuan Rencana Kerja Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang telah diterapkan adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona;*

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu perhatian akan 2 hal pokok yang menjadi komponen tujuan tersebut, yakni :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas baik sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang merupakan pelaksana pelayanan publik,
2. Peningkatan program dan kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sebagaimana yang terdapat pada Renstra Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026, sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona;
2. Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona.

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Angkona Tahun 2025 disajikan dalam lampiran **Tabel. 04**.

Tabel . 04
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angkona Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Kapasitas pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Tingkat Pertumbuhan IKM	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Angkona.	Nilai LAKIP	70,00%
			Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,94%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran Renja Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025, maka akan dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan :

a. Sasaran 1 :

Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona :

Didukung oleh 1 program, dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan, yaitu :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

04 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

III Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

07 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

IV Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

08 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
- 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 12 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 14 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VI Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 16 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 17 Pengadaan Mebel
- 18 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 22 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Sasaran 2 :

Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona :

Terdiri dari 5 program, dengan 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu :

B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

IX Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

27 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

X Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

28 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

29 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

XI Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

30 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

31 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

XII Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

32 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

XIII Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

33 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- XIV Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- 34 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 35 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ANGKONA

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berpodoman pada Renstra Kecamatan Angkona Kabupeten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Angkona merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Angkona. Keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas pereturan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang podoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan demikian Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam **Tabel. 05** pada lampiran.

TABEL 05
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN LUWU TIMUR

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Tahun 2026
		Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN			2.812.183.900	3.045.500.000
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.652.001.025	2.808.500.000
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43.134.900	44.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen 16.337.650	16.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen 7.709.200	8.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen 2.311.300	3.000.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7 Laporan 16.776.750	16.500.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.046.229.475	2.066.000.000
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19 Orang/bulan 2.011.273.575	2.030.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	19 Laporan 34.955.900	36.000.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.907.650	15.000.000
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	12 Laporan 13.907.650	15.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		44.784.300	61.000.000

8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	-	8.000.000
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 Dokumen	13.725.300	13.000.000
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	31.059.000	40.000.000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah			264.775.400	287.500.000
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	5.891.000	6.500.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	11.375.400	12.000.000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12.595.000	15.000.000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	27 Dokumen	9.900.000	9.000.000
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	6 Laporan	88.000.000	100.000.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	600 Laporan	137.014.000	145.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79.112.800	121.000.000
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	25.000.000	25.000.000
18	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	8.532.800	13.000.000
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	25.380.000	33.000.000
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	20.200.000	50.000.000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.616.500	127.000.000
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	4 Laporan	14.904.800	16.000.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	12 Laporan	36.703.200	37.000.000

23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	3 Laporan	6.825.000	4.000.000
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	12 Laporan	57.183.500	70.000.000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.440.000	87.000.000
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	19.000.000	23.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 Unit	12.140.000	15.000.000
27	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	-	2.000.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	13.300.000	35.000.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	0	-	12.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.273.100	81.000.000
IX	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			30.273.100	81.000.000
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang diterbitkan	1200 Dokumen	30.273.100	34.000.000
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		47.000.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			78.137.775	95.000.000
X	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			78.137.775	95.000.000
32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	6 Lembaga K emasyarakat an	13.021.500	15.000.000
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	4 Laporan	65.116.275	80.000.000
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13.704.800	16.000.000

XI	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			9.283.400	11.000.000
34	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang difasilitasi	4 Laporan	6.085.900	7.000.000
35	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran keenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Laporan	3.197.500	4.000.000
XII	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			4.421.400	5.000.000
36	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	4 Laporan	4.421.400	5.000.000
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			19.811.600	23.000.000
XIII	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			19.811.600	23.000.000
37	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	19.811.600	23.000.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			18.255.600	22.000.000
XIV	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18.255.600	22.000.000
38	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan/atau Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	12 Dokumen	12.260.400	15.000.000
39	Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	0	-	-
40	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Diwilayah Kecamatan	1 Laporan	5.995.200	7.000.000
				2.812.183.900	3.045.500.000

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Angkona dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Angkona.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Angkona. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Angkona ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis Kec. Angkona Tahun 2021-2026, maka dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Isi dari Renja Kecamatan Angkona pada intinya merupakan uraian proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur secara optimal, juga mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Demikian Dokumen Rencana kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kinerja SKPD khususnya Kantor Camat Angkona untuk tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Angkona untuk Tahun 2025 sangat tergantung pada kinerja seluruh aparatur yang berada di bawah lingkup pemerintahan Kecamatan Angkona serta dukungan penuh dari masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait di wilayah Kecamatan Angkona.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur kedepannya, Amin.

Angkona, 19 Juli 2024

Camat Angkona,



PUTU GEDE SUDARSANA,SKM.,M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19820205 200604 1 011